

## **Maksimalisasi Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi: Strategi Pendampingan dan Manajemen yang Efisien**

**Sakum\*<sup>1</sup>, Sukron Mamun<sup>2</sup>, Ali Nur Ahmad<sup>3</sup>, Kisanda Midisein<sup>4</sup>, Listiyan Achmad<sup>5</sup>**

Universitas Pelita Bangsa

sakum@pelitabangsa.ac.id , sukron@pelitabangsa.ac.id , ali.ahmad@pelitabangsa.ac.id ,

kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id , listian.achmad@pelitabangsa.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research aims to explore the potential of zakat in empowering the economic community in Indonesia, with a focus on mentoring and efficient management strategies. Zakat, as an Islamic economic instrument, has strategic potential to overcome income inequality and promote economic equality. In Indonesia, with a majority Muslim population and cultural diversity, zakat is expected to significantly strengthen economic empowerment and community welfare. This research uses a qualitative approach involving observation, interviews and literature review. Field observations were carried out to understand the implementation of zakat in daily operations, while interviews with stakeholders such as entrepreneurs, zakat institution managers, and consumers provided in-depth insight into the challenges and opportunities in zakat management. A literature review was carried out to build a theoretical foundation and understand developments and policies related to zakat. Initial findings show that although zakat institutions in Indonesia have developed, the potential of zakat as an economic tool is not yet optimal because it is often considered a voluntary contribution. Optimizing zakat can be achieved through implementing the principles of good governance, integration in fiscal policy, and the use of digital systems for administration. Collaboration with other institutions is also important to increase transparency and accountability. It is hoped that this research can provide strategic guidance for the development and implementation of zakat as a more effective tool for economic empowerment, with a positive impact on reducing poverty and improving community welfare.*

**Keywords: Economy, Indonesia, Optimization, Zakat**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada strategi pendampingan dan manajemen yang efisien. Zakat, sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi strategis untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan mempromosikan pemerataan ekonomi. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim dan keberagaman budaya, zakat diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara, dan kajian literatur. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami implementasi zakat dalam operasional sehari-hari, sementara wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pengusaha, pengelola lembaga zakat, dan konsumen memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat. Kajian literatur dilakukan untuk membangun landasan teoretis dan

memahami perkembangan serta kebijakan terkait zakat. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun lembaga zakat di Indonesia telah berkembang, potensi zakat sebagai alat ekonomi belum optimal karena sering dianggap sebagai sumbangan sukarela. Pengoptimalan zakat dapat dicapai melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, integrasi dalam kebijakan fiskal, dan penggunaan sistem digital untuk administrasi. Kerjasama dengan lembaga lain juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis untuk pengembangan dan implementasi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, dengan dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci: Ekonomi, Indonesia, Optimalisasi, Zakat**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agama serta mayoritas penduduk Muslim, mengalami dampak signifikan terhadap nilai-nilai yang membentuk perilaku sosial ekonomi saat ini. Dalam konteks ini, zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai alat pemerataan pendapatan yang efektif. Zakat diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian negara, khususnya dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan memainkan peran vital baik dari perspektif ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat (Yusuf al-Qardawi, 2006).

Sahida dkk. (2013) menguraikan bahwa sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip perlawanan terhadap akumulasi kekayaan dan prinsip gotong royong. Akumulasi kekayaan yang tidak produktif dapat menyebabkan resesi ekonomi, sementara prinsip gotong royong, termasuk melalui zakat, mendorong distribusi kekayaan secara produktif. Zakat, yang disebutkan sebanyak tiga puluh kali dalam Al-Quran, adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyucikan dan memberkahi harta mereka serta tidak mengurangi kekayaan tetapi meningkatkan akhlak (Sudarsono, 2002; Purbasari, 2015). Zakat juga dapat digunakan sebagai modal usaha kecil, memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek.

Pada pertengahan 1990-an, lembaga zakat mulai berkembang di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat secara efektif (Soekarni & Muhammad, 2008). Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang direvisi pada 2011. Meskipun lembaga zakat telah berkembang pesat, potensi zakat sebagai alat ekonomi masih belum maksimal karena sering dianggap sebagai sumbangan sukarela dan tidak ada paksaan bagi yang wajib membayar zakat (Rohim, 2019). Pengoptimalan potensi zakat dapat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, terutama dengan integrasi zakat dalam kebijakan fiskal. Penelitian sejarah implementasi zakat dalam kebijakan fiskal negara-negara Islam dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang administrasi zakat dan dampaknya terhadap ekonomi.

Asesmen lapangan menunjukkan bahwa peran zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan perlu diperkuat dengan pendekatan strategis, termasuk penerapan prinsip tata kelola yang baik dan penggunaan sistem digital untuk administrasi zakat. Kerjasama dengan lembaga lain juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat secara transparan dan akuntabel.

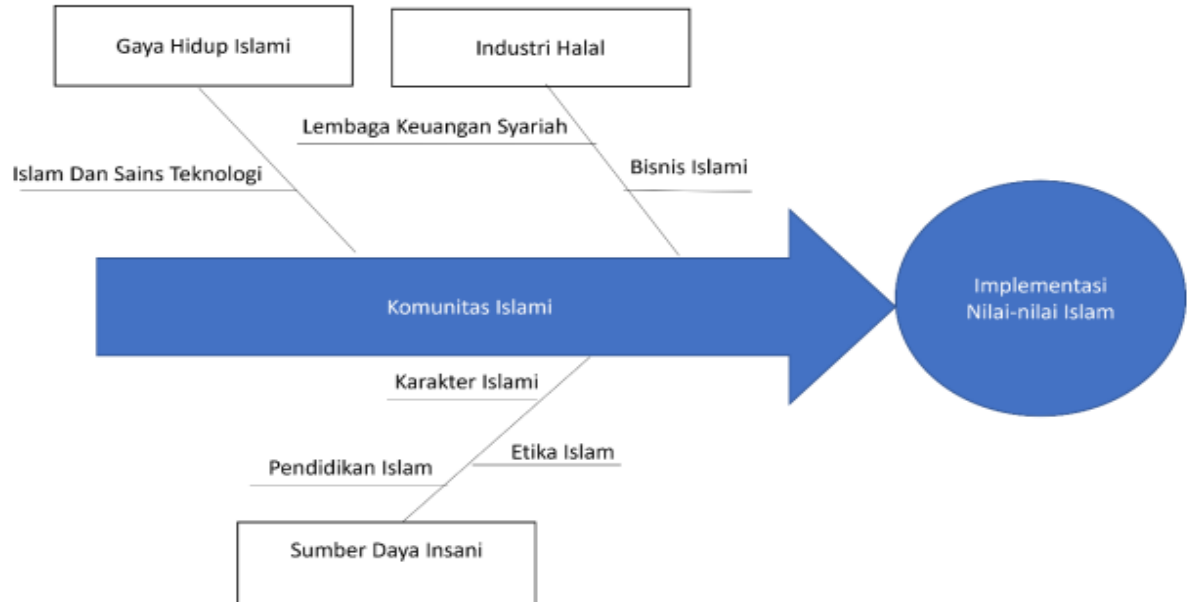
## **TINJAUAN LITERATUR**

Zakat berfungsi sebagai alat transfer kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, yang secara efektif berperan dalam redistribusi sumber daya ekonomi. Dalam ranah ekonomi, zakat lebih dari sekadar kewajiban religius; ia juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zakat melibatkan berbagai jenis harta yang diwajibkan untuk dizakati menurut hukum Islam, seperti emas, perak, uang, barang dagangan, hasil peternakan, hasil bumi, dan hasil tambang. Keadilan dan ketepatan dalam distribusi zakat sangat penting untuk mendukung individu dan organisasi yang fokus pada fakir miskin.

Modal sosial mencakup sekumpulan nilai dan norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu komunitas, yang mendukung terjadinya kerjasama. Kepercayaan adalah komponen utama dari modal sosial, karena memfasilitasi kerjasama yang efisien. Modal sosial memainkan peran signifikan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara, dan terlihat dalam komitmen terhadap kontrak sosial serta nilai-nilai seperti saling membantu, berbagi tanggung jawab, dan solidaritas. Dalam perspektif Islam, modal sosial terkait dengan prinsip-prinsip kerjasama dan dukungan antar anggota masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan mencakup aspek materi, sosial, dan pendapatan, termasuk kekurangan barang dan layanan dasar, isolasi sosial, serta penghasilan yang tidak mencukupi. Untuk mengatasi kemiskinan, penting untuk mencari sumber pendapatan yang halal di luar pekerjaan tradisional, guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar.

## Roadmap Penelitian



**Gambar 1.** Roadmap Penelitian: Industri Halal Syariah

Roadmap penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang memetakan langkah-langkah dan proses yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks studi industri halal syariah, roadmap ini berfungsi untuk memberikan arah yang jelas tentang bagaimana penelitian akan dilakukan dari awal hingga akhir. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan tujuan. Tahap awal ini mencakup penetapan masalah utama yang akan diteliti dalam industri halal syariah, serta perumusan tujuan spesifik, seperti memahami perkembangan industri halal, menganalisis kepatuhan terhadap prinsip syariah, atau mengevaluasi dampak ekonomi dari sektor ini. Dokumen yang dihasilkan dari tahap ini akan merinci masalah penelitian dan tujuan yang hendak dicapai.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan tinjauan literatur dan analisis awal. Pada tahap ini, kajian terhadap studi terdahulu, teori yang relevan, serta kondisi saat ini dalam industri halal akan dilakukan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dasar yang akan mendukung penelitian. Hasil dari fase ini berupa laporan tinjauan pustaka dan analisis kondisi awal. Desain metodologi penelitian menjadi langkah berikutnya, di mana peneliti akan menyusun metode yang akan digunakan untuk penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, metode analisis, dan alat yang diperlukan. Ini mencakup rencana untuk survei, wawancara, studi kasus, dan mungkin pengembangan modul pelatihan jika diperlukan. Dokumentasi metodologi dan alat pengumpulan data akan dihasilkan dari tahap ini.

Tahap pengumpulan data melibatkan pelaksanaan survei, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan observasi lapangan untuk mendapatkan data yang relevan terkait industri halal syariah. Data yang dikumpulkan akan berupa dataset dan catatan wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan penting. Analisis ini bertujuan memberikan wawasan mengenai aspek-aspek yang diteliti, seperti efektivitas pelatihan atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil dari tahap ini adalah laporan analisis data dan temuan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis, tahap selanjutnya adalah pengembangan dan implementasi intervensi. Ini mencakup pengembangan program atau kebijakan baru, seperti modul pelatihan atau perbaikan dalam kebijakan industri halal, dan penerapan di lapangan untuk meningkatkan hasil analisis. Output dari fase ini meliputi modul pelatihan dan laporan pelaksanaan intervensi. Evaluasi dan penyesuaian adalah tahap di mana efektivitas intervensi dinilai. Umpan balik dari peserta dikumpulkan dan hasil dianalisis untuk menilai pencapaian tujuan penelitian serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Laporan evaluasi dan rekomendasi penyesuaian merupakan hasil dari fase ini.

Akhirnya, penyusunan laporan akhir dan publikasi dilakukan. Pada tahap ini, laporan penelitian yang komprehensif disusun dan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media terkait. Selain itu, hasil penelitian juga disebarluaskan kepada pemangku kepentingan seperti lembaga industri halal, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Artikel ilmiah, laporan akhir, dan materi penyebarluasan adalah hasil dari tahap ini.

Gambar 1, yang bertajuk Roadmap Penelitian: Industri Halal Syariah, akan memberikan representasi visual dari tahapan-tahapan ini, menjelaskan urutan dan hubungan antar tahap dalam penelitian. Roadmap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terorganisir, dengan fokus pada pencapaian hasil yang berdampak positif bagi pengembangan dan pengelolaan industri halal syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada observasi dan kajian literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali dan memahami fenomena secara mendalam, serta memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai implementasi prinsip syariah dalam industri halal di Kabupaten Bekasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik-praktik dan kebijakan secara rinci melalui observasi langsung serta tinjauan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik utama. Observasi

lapangan adalah metode pertama yang digunakan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi langsung tentang praktik dan penerapan prinsip syariah dalam industri halal. Peneliti akan mengunjungi lokasi-lokasi usaha, lembaga zakat, dan pusat distribusi produk halal. Observasi ini membantu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional sehari-hari serta bagaimana interaksi antara pelaku industri dan konsumen berlangsung.

Selanjutnya, kajian literatur akan dilakukan untuk membangun landasan teoretis dan mendapatkan perspektif dari studi-studi terdahulu. Peneliti akan menelaah buku, artikel ilmiah, laporan industri, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan industri halal dan prinsip syariah. Kajian ini bertujuan untuk menyusun pemahaman menyeluruh tentang perkembangan dan tantangan yang ada dalam industri halal. Wawancara juga akan dilaksanakan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi, seperti pengusaha, pengelola lembaga zakat, dan konsumen produk halal. Wawancara ini dirancang untuk menggali wawasan dan pengalaman mendalam dari berbagai perspektif mengenai penerapan prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi dalam industri halal.

Selain itu, pengumpulan dokumentasi akan dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen penting seperti laporan tahunan, kebijakan perusahaan, dan regulasi terkait. Dokumentasi ini akan mendukung pemahaman mengenai kebijakan dan praktik dalam industri halal serta memberikan data tambahan untuk analisis lebih lanjut. Bagan alur penelitian akan menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dilalui selama penelitian. Dimulai dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan metodologi dan persiapan logistik untuk observasi dan wawancara. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi temuan utama dan mengembangkan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Terakhir, laporan akhir penelitian akan disusun dan dipublikasikan, serta hasil penelitian akan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi. Setiap anggota tim peneliti memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan penelitian berjalan lancar. Anggota A bertanggung jawab atas perencanaan penelitian dan pelaksanaan observasi lapangan. Anggota B mengelola proses wawancara, mulai dari penyusunan panduan hingga transkripsi data. Anggota C menangani kajian literatur dan integrasi temuan dengan data lapangan. Anggota D fokus pada analisis data, penyusunan laporan, dan publikasi hasil penelitian. Dengan struktur yang jelas dan terorganisir, serta pembagian tugas yang efektif, penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil yang komprehensif dan berdampak positif pada pengembangan industri halal syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi strategis yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan. Potensi ini terletak pada kemampuannya untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, potensi zakat belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun lembaga zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertengahan 1990-an, dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang direvisi pada 2011, zakat seringkali dipandang lebih sebagai sumbangan sukarela daripada alat ekonomi yang terstruktur. Hal ini mengakibatkan pengelolaan zakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi ekonomi yang lebih luas.

Teori yang mendukung potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi termasuk teori redistribusi kekayaan yang diusulkan oleh Keynesian dan teori modal sosial. Menurut teori redistribusi kekayaan, zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mentransfer kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, meningkatkan konsumsi dan investasi di sektor-sektor yang lebih produktif. Sementara itu, teori modal sosial menggarisbawahi pentingnya kepercayaan dan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Zakat, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat modal sosial dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat serta meningkatkan kerjasama sosial.

### **Tantangan dalam Pengelolaan Zakat**

Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan zakat yang teridentifikasi melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan meliputi: Kurangnya Integrasi dalam Kebijakan Fiskal, zakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan fiskal negara. Kurangnya integrasi ini mengakibatkan banyak potensi zakat yang terabaikan dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Teori fiskal modern menggarisbawahi pentingnya integrasi berbagai instrumen ekonomi dalam kebijakan fiskal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

Persepsi Publik dan Transparansi, zakat sering dianggap sebagai sumbangan sukarela, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Teori kepercayaan sosial mengidentifikasi bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam program-program zakat. Keterbatasan Sistem Digital dan Teknologi, administrasi zakat

yang masih bergantung pada metode konvensional menghambat efisiensi dan transparansi. Teori inovasi teknologi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.

## **Strategi Pengoptimalan Zakat**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam pemberdayaan ekonomi meliputi: Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik: Implementasi prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Teori tata kelola menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Integrasi dalam Kebijakan Fiskal: Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara dapat memperkuat perannya sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Ini termasuk pengaturan yang lebih baik mengenai kewajiban zakat dan insentif untuk membayar zakat. Teori kebijakan fiskal mendukung bahwa integrasi berbagai instrumen ekonomi, termasuk zakat, dalam kebijakan fiskal dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dan merata.

Pemanfaatan Teknologi Digital, penggunaan teknologi digital dalam administrasi zakat dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Teori sistem informasi menggarisbawahi pentingnya teknologi dalam memperbaiki administrasi dan meningkatkan aksesibilitas serta transparansi. Kerjasama dengan Lembaga Lain: Membangun kerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Kolaborasi ini dapat membantu dalam pengumpulan data, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi. Teori jaringan sosial menunjukkan bahwa kerjasama antar lembaga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas program.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan dan implementasi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif: Pengembangan Kurikulum Pendidikan Zakat: Integrasi materi tentang zakat dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam ekonomi. Teori pendidikan sosial mendukung bahwa pendidikan yang baik dapat membentuk sikap dan perilaku positif terhadap pengelolaan zakat. Peningkatan Kampanye Sosialisasi: Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Teori komunikasi massa mendukung bahwa kampanye yang efektif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara signifikan. Penerapan Model Pengelolaan Berbasis Teknologi, menerapkan model pengelolaan zakat yang berbasis teknologi untuk mempermudah administrasi dan

meningkatkan transparansi. Teori inovasi teknologi menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat memperbaiki proses administrasi dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.

Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan, Secara berkala mengevaluasi kebijakan dan praktik pengelolaan zakat untuk memastikan efektivitas dan relevansi dalam konteks perekonomian yang dinamis. Teori evaluasi kebijakan mendukung bahwa evaluasi yang rutin dan penyesuaian kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif. Potensi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi di Indonesia sangat besar, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsinya. Pengelolaan zakat yang lebih baik melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, integrasi dalam kebijakan fiskal, dan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi pengembangan zakat dalam konteks ekonomi Indonesia, dengan tujuan akhir untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Keberagaman budaya dan agama di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai yang membentuk perilaku sosial dan ekonomi saat ini. Dalam konteks ini, zakat memegang potensi strategis yang besar sebagai alat untuk pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun zakat diharapkan dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif ajaran Islam serta pembangunan sosial-ekonomi, potensi tersebut masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Zakat sering dipandang lebih sebagai sumbangan sukarela ketimbang sebagai instrumen ekonomi yang terstruktur, sehingga pengelolaannya belum optimal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat mencakup kurangnya integrasi dalam kebijakan fiskal, rendahnya transparansi dan kepercayaan publik, serta keterbatasan sistem digital yang ada.

Untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi, langkah-langkah strategis perlu diambil. Pertama, pengelolaan zakat harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi zakat. Selanjutnya, zakat perlu diintegrasikan secara lebih mendalam ke dalam kebijakan fiskal negara agar dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang efektif. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi zakat juga harus ditingkatkan untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi. Selain itu, memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, adalah

hal yang penting untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efektivitas program zakat.

Penting untuk mengintegrasikan materi tentang zakat ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai peran zakat dalam ekonomi sejak usia dini. Kampanye sosialisasi yang intensif juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi, dengan memanfaatkan berbagai media dan metode untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selain itu, penerapan model pengelolaan zakat berbasis teknologi digital harus diprioritaskan untuk mempermudah administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat. Terakhir, kebijakan dan praktik pengelolaan zakat perlu dievaluasi secara berkala dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam konteks perekonomian yang dinamis. Dengan melaksanakan rekomendasi ini secara konsisten, diharapkan potensi zakat dapat dioptimalkan untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qardhawi Y. Islam dan sistem ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press; 2006.
- Dahya J, McConnell JJ, Travlos NG. The Cadbury Committee, corporate performance, and top management turnover. *J Finance*. 2002;57(1):461-83.
- Fukuyama F. Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press; 1995.
- Fukuyama F, Ruslani. Modal Sosial.
- Mintarti. Ajaran Islam tentang Modal Sosial. 2003.
- Purbasari I. Zakat: Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jakarta: Gema Insani Press; 2015.
- Rohim A. Peran Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Pustaka Alvabet; 2019.
- Sahida A, et al. Prinsip Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers; 2013.
- Soekarni A, Muhammad A. Lembaga Zakat di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2008.
- Sudarsono S. Dasar-Dasar Teori Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2002.
- Yaqin. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat: Konsep dan Implementasi. 2015.
- Yaqin. Kemiskinan: Definisi, Penyebab, dan Solusi. 2015.
- Yaqin. Penerapan Good Corporate Governance dalam Lembaga Amil Zakat. ; 2015.
- Yaqin. Sinergi, Kolaborasi, dan Kerjasama dalam Pengelolaan Zakat, 2015.
- Yaqin. Zakat Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi.; 2015.